

**PENGARUH FUNGSI PARPOL DALAM PENDIDIKAN POLITIK
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU LEGISLATIF 2014**

Nurhidayah.Br.Manik, Yohanes Bahari, Wanto Rivaie
Program Studi Pendidikan Sosiologi FKIP Untan, Pontianak
Email: nurhidayah.br.manik82@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Metode penelitian ini adalah Kuantitatif dengan bentuk Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket, wawancara, dan studi dokumentasi, sedangkan alat pengumpulan data adalah angket, panduan wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 33.548 masyarakat Meliau yang terdaftar pada DPT dengan jumlah Sampel penelitian adalah 395. Hasil penelitian menunjukkan Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik berkategori baik (73,34%) dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif berkategori baik (68,39%). Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh fungsi parpol dalam pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai $r_{hitung} (9,279) > r_{tabel} (0,795)$. Nilai determinan $R^2 = 0,692$ yang berarti sumbangan pengaruh budaya organisasi terhadap hasil belajar siswa adalah 69,2% dan sisanya 30,8% ditentukan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi Politik

Abstract: This research goals to determine the influence of politic party function on political education toward the society participation on legislative general election in Meliau municipal Sanggau regency. This research method is quantitative with descriptive form of research. The techniques of data collection are questionnaire, interview, and documentation study, while the data collection tools are questionnaire, interview guide, and documentation. The population in this research is 33.548 people of Meliau society that registered on DPT with the sample is 395. The findings show that the party function on political education is good (73,34%) and society participation on legislative general election is good (68,39%). The hypothesis test results there is an influence of politic party function on political education with $r_{calculus} (9,279) > r_{table} (0,795)$. Determinant value $R^2 = 0,692$ means the influence of politic party function on political education toward the society participation on legislative general election is 69,2% and the remain 30,8% is influenced by other variables.

Keywords: Politic Education, Politic Participation

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran serta kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Menurut Aristoteles (dalam Ng. Philipus dan Nurul Aini,2004:89) selama manusia menjadi makhluk sosial (*zoon politikon*) selama itu kita menemukan politik. Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari kegiatan-kegiatan politik seperti bagaimana kita menyatukan perbedaan-perbedaan dalam masalah pelaksanaan politik.

Untuk aktivitas pemilihan umum di indonesia diatur dalam undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam BAB XIX pasal 244 ayat 1 (dalam Rozali Abdullah,2009:554) yang berbunyi bahwa, pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Menurut Keith Faulks (2012: 226) partisipasi politik ialah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi politik merupakan aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga Negara, bukan politikus atau pegawai negeri, partisipasi politik ini pun bersifat sukarela dan bukan dimobilisasi oleh Negara maupun partai yang berkuasa. Dengan itu, maka kita mengetahui bahwa partisipasi politik itu merupakan suatu hal yang bersifat suka rela terhadap masyarakat yang aktif dalam perpolitikan di Indonesia ini. Disini dapat kita lihat bahwa masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut keputusan bersama (umum). Oleh karena itu di dalam mengambil keputusan dibutuhkannya kerja sama antara partai politik dan masyarakat untuk memberikan keputusan yang baik dalam perpolitikan bagi negaranya. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Khusus mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam BAB XIX pasal 224 ayat 2 (dalam Rozali Abdullah,2009:554) disebutkan bahwa: partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat hasil pemilu, dengan ketentuan :1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, 2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu, 3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, 4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Salah satu partisipasi politik dapat kita lihat pada pemilihan umum legislatif, menurut Miriam Budiardjo (2002:173) badan legislatif adalah lembaga yang "*legislate*" atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat; maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat; nama lain yang sering dipakai ialah parlemen. Untuk meningkatkan

keikutsertaan masyarakat dalam pemilu atau yang lebih sering dikenal dengan istilah partisipasi politik disinilah pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat, yang mana pengertian pendidikan politik itu sendiri. Menurut Habib Syafingi (2009: 56) pendidikan politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pentingnya pendidikan politik ini juga di muat dalam UU No. 2/2008 (dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008: 233) menurut UU No. 2/2008 tentang partai politik, pasal 31 dikemukakan partai politik melakukan pendidikan politik : 1. Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggungjawabnya dengan mempengaruhi keadilan dan kesejahteraan gender dengan tujuan antara lain: a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pendidikan politik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Pada konteks ini, peranan partai politik sangatlah penting, karena partai politik diwajibkan untuk menjalankan fungsi pendidikan politik, dan juga UU partai politik telah ditegaskan, bahwa partai politik diwajibkan untuk melakukan pendidikan politik. Atas dasar itulah, seharusnya partai politik memiliki tanggungjawab moral untuk melaksanakan pendidikan politik secara konsisten dan berkesinambungan.

Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan politik masyarakat, membentuk insan-insan politik yang cerdas, meningkatkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya, serta mampu melakukan partisipasi politik dalam menyuarkan aspirasi politiknya, dan mampu memilih dengan baik para wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan (legislatif) maupun di pemerintahan (eksekutif: presiden, gubernur, bupati dan walikota). Pada realitanya di Indonesia fungsi pendidikan politik ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berdampak pada tingkat kecerdasan masyarakat di dalam pengetahuan dan keterampilan berpolitik dari pemilu ke pemilu tidak ada peningkatan. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih belum bisa memandang bahwa pemilu adalah suatu hal yang penting diikuti. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau terdapat total pemilih tetap yang tidak menggunakan hak suaranya tergolong banyak yaitu dari jumlah total penduduk kecamatan meliau sebanyak 33.548 suara, hanya 27.832 atau 82,97 % yang menggunakan hak suaranya, sementara 5.716 atau 17,03 % tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan legislatif tahun 2014.

Melalui penelitian ini dengan berdasarkan deskripsi di lapangan dan data yang diperoleh, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan politik terhadap partisipasi dalam pemilihan legislatif dengan judul Pengaruh Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

METODE

Memecahkan masalah penelitian diperlukan adanya suatu pendekatan dan metode penelitian. Menurut Moh. Kasiram (2008:15) pendekatan kuantitatif adalah “suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui”. Menurut Sugioyono(2011:2) “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Selanjutnya menurut Nawawi (2012:67),”metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek peneliitan (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain – lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya”. Yang menjadi alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian jenis deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan pengaruh fungsi partai politik dalam pendidikan politik terhadap partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif 2014 kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kecamatan Meliau yang terdaftar dalam pemilih tetap tahun 2014 yang berjumlah 33.548 dengan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin yaitu sebanyak 395 sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung yaitu wawancara/interviu. Menurut Nawawi (2012:118) interviu adalah “alat pengumpul data dengan mempergunakan tanya jawab antar pencari informasi dan sumber informasi”. Wawancara dilakukan peneliti kepada 2 orang anggota legislatif untuk mendapatkan informasi yang memperkuat jawaban dari angket. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik komunikasi tidak langsung yaitu angket dan studi dokumenter. Angket/Kuesioner menurut Jannah (2012:143) adalah berisikan daftar pertanyaan yang mengukur variabel-variabel, hubungan di antara yang ada, atau juga pengalaman atau opini responden. Angket digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi tentang variabel bebas yaitu fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan variabel terikat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2014, kepada masyarakat Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau yang terdaftar dalam pemilih tetap tahun 2014. Sedangkan studi dokumenter yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 2012:141). Studi dokumenter dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan bahan tertulis berupa data hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara partai politik Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau pada pemilu legislatif 2014 dan data dari pusat badan statistik Kabupaten Sanggau.

Sebelum angket disebarkan ke masyarakat meliau, angket diuji validitas dan reliabilitas, uji asumsi, dan regresi linier sederhana. Setelah itu, data yang sudah baik angket akan diinterpretasi dan diolah menjadi persentase. Interpretasi data untuk kedua variabel menggunakan kategori persentase menurut Riduwan (2010:88) sebagai berikut: 1. 80%-100%, 2. 60%-80%, 3. 41%-60%,4. 21%-40%, 5. 0%-20%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil pengujian angket fungsi partai politik dalam pendidikan politik secara statistik dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel X

Item nomor	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,633	Valid
2	0,707	Valid
3	0.809	Valid
4	0.752	Valid
5	0.632	Valid
6	0.840	Valid
7	0.889	Valid
8	0.740	Valid
9	0.812	Valid
10	0.850	Valid
11	0.797	Valid
12	0.761	Valid
13	0.720	Valid
14	0. 660	Valid
15	0.772	Valid
16	0.582	Valid
17	0.081	Tidak Valid

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Berikut ini adalah hasil pengujian angket partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif (Y) secara statistik dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item nomor	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,773	Valid
2	0,882	Valid
3	0.787	Valid
4	0.796	Valid
5	0.727	Valid
6	0.797	Valid
7	0.485	Valid
8	0.745	Valid
9	0.678	Valid
10	0.541	Valid
11	0.504	Valid
12	0.784	Valid
13	0.858	Valid
14	0.831	Valid
15	0.745	Valid
16	0.716	Valid

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Conbrach's Alpha	N of Items
.929	32

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Dari hasil uji validitas dan reliabilitas, 32 butir item angket dinyatakan valid karena koefisien item > koefisien korelasinya, 0.349 dan reliabel karena koefisien Conbrach's Alpha > tolak ukur koefisien 0,80-1,000 (sangat kuat).

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji one-sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp.Sig > taraf signifikansi (α), yaitu variabel X (0.20) dan variabel Y (0.73) masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
VARIABEL_X	,050	395	,019	,991	395	,020
VARIABEL_Y	,052	395	,012	,993	395	,073

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Uji Linieritas

Berdasarkan hasil perhitungan Interpretasinya adalah: dapat kita lihat pada kolom Sig, pada baris Linearity di Tabel Anova, dapat kita lihat nilainya $0,000 < 0,05$ dan pada kolom Sig pada baris Deviation From Linearity dapat kita lihat nilainya $0,195 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi syarat linearitas.. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table						
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
VARIABEL_Y	Between (Combined)	18026,897	42	429,212	22,657	,000
*	Groups	17095,300	1	17095,300	902,427	,000
VARIABEL_X	Linearity					
	Deviation from	931,597	41	22,722	1,199	,195
	Linearity					
	Within Groups	6668,177	352	18,944		
	Total	24695,073	394			

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Pembahasan

Rumusan Masalah 1

Uraian mengenai fungsi partai politik dalam pendidikan politik (X) pada masyarakat meliau berdasarkan jawaban angket dari semua responden diperoleh hasil berupa persentase dari fungsi partai politik dalam pendidikan politik seperti tabel 6.

Tabel 6. Kategori Fungsi Partai dalam Pendidikan Politik

Variabel X	SST	ST	R	TS	STS
Indikator 1	37%	54%	5%	3%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 1 kategori sangat tinggi karena bernilai 85,9%					
Indikator 2	14%	53%	26%	6%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 2 kategori tinggi karena bernilai 75,57%					
Indikator 3	9%	52%	27%	11%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 3 kategori tinggi karena bernilai 71,84%					
Indikator 4	13%	48%	25%	13%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 4 kategori tinggi karena bernilai 71,92%					
Indikator 5	13%	35%	32%	19%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 5 kategori tinggi karena bernilai 67,79%					
Indikator 6	12%	50%	24%	13%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 6 kategori tinggi karena bernilai 71,40%					
Indikator 7	11%	43%	32%	13%	1%
Presentase secara keseluruhan indikator 7 kategori tinggi karena bernilai 69,94%					

Sumber: kategori menurut Anas Sudijono (2007:329)

Berdasarkan hasil penelitian ini Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik sudah terlaksana dengan baik karena rata-rata hasil presentase terlaksananya tergolong tinggi yaitu 73,34%. Hal tersebut juga didukung oleh apa yang dikemukakan 2 orang anggota legislatif dari partai P3K dan PPP yang terpilih pada pemilu 2014 lalu, beliau-beliau mengatakan bahwa partai politik khususnya partai yang menaungi anggota legislatif tersebut sudah cukup maksimal dalam pelaksanaan pendidikan politik, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada desa-desa yang berada dipedalaman yang masih belum bisa dijangkau untuk pelaksanaan pendidikan politik, dikarenakan keterbatasan dana maupun aliran partai yang berbeda seperti yang disampaikan oleh anggota legislatif yang bernaungkan partai PPP yang beraliran islami, menurut keterangan beliau bahwa beliau lebih menargetkan untuk melakukan sosialisasi di desa-desa yang mayoritas penduduknya muslim karna apabila masih melakukan sosialisasi di desa yang mayoritasnya nonmuslim kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.

Anggota legislatif dari partai P3K juga sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh anggota legislatif dari partai PPP beliau juga menambahkan bahwa dengan pelaksanaan pemilu legislatif 2014 tahun lalu akan membawa dampak yang berpengaruh bagi masyarakat kedepannya untuk lebih memperhatikan kembali mengenai pemahaman masyarakat mengenai politik dan lebih antusias untuk mengikuti pendidikan politik, karena baik atau buruknya pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat dari siapa pemimpin daerah yang

dipilih oleh rakyat itu sendiri dan masyarakat tentunya akan belajar lagi dari hasil pemilu legislative 2014 tahun lalu. H. Abdullah juga mengatakan bahwa pelaksanaan fungsi partai politik dalam pendidikan politik sangat berpengaruh terhadap masyarakat kedepannya karena semakin baik masyarakat memahami apa itu makna dari arti politik sebenarnya, semakin baik pula pandangan masyarakat mengenai politik. Hal itulah yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan pola pikir masyarakat kedepannya sehingga masyarakat tidak akan lagi acuh dan masa bodoh terhadap jalannya politik di daerah kita apalagi pada saat pemilu legislatif yang mana akan dapat kita rasakan langsung pembangunannya di daerah kita, karena dengan suksesnya pelaksanaan pemilu legislatif inilah masyarakat akan lebih mudah lagi untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada wakil-wakil rakyat yang berada paling dekat di dalam lapisan masyarakat. Baik buruknya pelaksanaan pemerintah kedepannya itu adalah hasil dari pilihan masyarakat sendiri, hasil dari bagaimana sikap dan tindakan yang diberikan masyarakat kita dalam memandang dan mendukung jalannya politik itu sendiri.

Rumusan Masalah 2

Uraian mengenai partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif (Y) pada masyarakat meliau berdasarkan jawaban angket dari semua responden diperoleh hasil berupa persentase dari partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif seperti tabel 7.

Tabel 7. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2014

Variable Y	SST	ST	R	TS	STS
Indikator 1	11%	43%	28%	14%	3%
	Presentase secara keseluruhan indikator 1 kategori tinggi karena bernilai 69,22%				
Indikator 2	11%	51%	29%	8%	1%
	Presentase secara keseluruhan indikator 2 kategori tinggi karena bernilai 72,92%				
Indikator 3	7%	46%	31%	15%	1%
	Presentase secara keseluruhan indikator 3 kategori tinggi karena bernilai 68,62%				
Indikator 4	8%	40%	33%	16%	3%
	Presentase secara keseluruhan indikator 4 kategori tinggi karena bernilai 66,83%				

Sumber: kategori menurut Anas Sudijono (2007:329)

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif dengan indikator berupa Voting sudah terlaksana dengan Baik karena presentasinya tergolong Tinggi yaitu (68,22%), Terlibat dalam penyelenggaraan sudah terlaksana dengan Baik karena presentasinya tergolong Tinggi yaitu (72,92%), Terlibat dalam aktivitas komunal sudah terlaksana dengan Baik karena presentasinya tergolong Tinggi yaitu (68,62%), Kontak individu sudah terlaksana dengan Baik karena presentasinya tergolong Tinggi yaitu (66,83%).

Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif sudah terlaksana dengan baik karena rata-rata hasil presentase terlaksananya tergolong tinggi yaitu 68,39%. Hal tersebut juga didukung oleh apa yang dikemukakan 2 orang anggota legislatif dari partai P3K dan PPP beliau-beliau mengatakan bahwa partisipasi masyarakat pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu sudah terlaksana dengan baik, mengenai masih terdapatnya DPT yang tidak menggunakan hak suaranya pada

pemilu legislatif hal itu disebabkan oleh beberapa factor diantaranya masih terdapat suara yang terdata 2 kali hal ini biasanya dikarnakan penduduk pindah tempat tinggal tapi ditempat tinggalnya yang lama penduduk tersebut masih terdata dan terdata lagi di tempat tinggalnya yang baru, penduduk yang sudah meninggal dunia juga masih ada yang terdaftar pada DPT , serta kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggal, meski tidak dapat kita pungkiri juga bahwa masih ada segelintir masyarakat yang masih acuh-taacuh / tidak peduli dengan pelaksanaan pemilu.

Gusti Teja mengatakan bahwa fungsi partai politik dalam pendidikan politik ini sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu Legislatif belum dapat kita gambarkan secara langsung pengaruhnya kedepannya untuk saat ini, karena kita mesti membandingkannya dengan hasil pemilu selanjutnya, tetapi kalau dilihat dari hasil pemilu legislatif 2014 tentunya saya yakin akan memberikan dampak perubahan sikap yang lebih baik dari masyarakat mengenai politik itu sendiri setelah ia melihat dampak positif dari pemilu itu sendiri, selanjutnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat kita juga memerlukan bantuan peranan dari pemerintah untuk lebih menghimbau masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam politik.

H. Abdullah juga mengatakan bahwa dari hasil pelaksanaan pemilu legislatif 2014 lalu akan memberikan banyak perubahan terhadap pola fikir masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan dalam pelaksanaan politik, khususnya disini pada pemilu legislative karena dampak dari hasil pemilu tersebutlah yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat diantaranya terlaksananya pembangunan daerah yang baik tentunya apabila daerah tersebut dipimpin oleh wakil-wakil yang baik, karena seperti semboyan Indonesia bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentulah hal ini yang nantinya sangat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap politik, sehingga menjadi lebih baik dan benar, lebih pintar di dalam menentukan pilihan untuk kedepannya, dengan bukti yang sudah ada sekarang ini tentunya masyarakat akan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan hak suaranya.

Maka untuk pemilu yang akan datang itu masyarakat kita sudah lebih paham dari pengalaman di tahun 2014 lalu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah ada masyarakat akan melihat, walaupun mungkin caleg(calun legislatif) tadi orangnya baru, tapi karena kemasyrakatannya baik tetap akan di dukung oleh masyarakat nantinya, karena itu masyarakat tentunya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya pada pemilu legislatif 2014.

Rumusan Masalah 3

Tabel 8. Hasil Regresi Antara Variabel X terhadap Variabel Y.

Variabel	Harga t		Signifikansi		R ²
	Hitung	Tabel	Hitung	(α)	
X-Y	29,733	1,970	0,00	0,05	0,692

Sumber: Data Penelitian yang sudah diolah, 2015

Terdapat pengaruh Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Ha 1 ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel

Atau $29,733 > 1,970$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima atau “ terdapat pengaruh Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik “Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau”. Berdasarkan perhitungan Regresi Linier Sederhana diperoleh persamaan $Y = 9,279 + 0,795X$, yang artinya nilai Konstanta adalah 9,279 yaitu jika Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik (X) bernilai 0 (nol), maka Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif (Y) bernilai 9,279.

Nilai koefisien regresi variabel Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik (X) yaitu 0,795. Hal ini berarti setiap peningkatan Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik (X) sebesar 1, maka Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif akan mengalami peningkatan sebesar 0,795. Koefisien Determinasi pada penelitian ini menunjukkan kontribusi pengaruh Variabel Bebas yaitu Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik (X) terhadap Variabel Terikat yaitu Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif (Y) sebesar 0,692 atau 69,2 %, yang artinya presentase sumbangan Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Legislatif 2014 69,2 % sedangkan 30,8 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fungsi partai politik dalam pendidikan politik tinggi pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat pada pemilihan umum legislatif 2014 dengan persentase sebesar 69,2% atau termasuk dalam kategori tinggi pengaruhnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa terdapat pengaruh dari pelaksanaan fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman serta kesadaran akan hak dan tanggungjawab politik melalui kegiatan-kegiatan yang di adakan parpai politik dan keikutsertaan partai politik dalam berbagi kegiatan masyarakat sehingga masyarakat juga memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan politik.

Saran

Dalam rangka memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (pemilihan umum) legislatif selanjutnya, maka penulis mengajukan beberapa saran. Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain :1. Untuk partai politik (Parpol) Sebaiknya partai politik lebih meningkatkan upaya pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat secara terbina atau runtun waktu yang sudah tersistematis dan lebih dipantau lagi pelaksanaannya agar dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di desa-desa pedalaman. 2. Untuk masyarakat Sebaiknya masyarakat bisa lebih membuka wawasan dan sudut pandangnya terhadap jalannya politik dalam pemerintahan karena jalannya suatu pemerintahan juga sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perpspektif masyarakat mengenai pelaksanaannya.3. Untuk Pemerintah Setempat Sebaiknya pemerintah setempat lebih memperhatikan dan

meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan politik yang dilakukan oleh parpol dalam masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Rozali. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)*. Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada
- Budiarjo, Miriam. (2002). *Dasar – dasar ilmu politik*. Jakarta:Pt Gramedia Pustaka Utama
- Faulks Keith. (2012). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Kasiram, Moh. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Malang Press
- Nawawi, Hadari. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Cetakan ke-13). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Philipus,Ng Dan Aini,Nurul. (2006). *Sosiologi Dan Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Prasetyo. Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada
- Riduwan. (2010). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta
- (Syafingi, Habib. 2009. *Urgensi Pendidikan Politik dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*.Yogyakarta: PKHK-FK Universitas Janabadra Yogyakarta (<http://portal.mahkamah.konstitusi.go.id>) (diakses pada tanggal 13 april 2015)
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Cetakan ke-18). Bandung: Alfabeta